

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menulis penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan sesuai topik yang sedang diteliti. Peneliti melakukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan untuk menegaskan penelitian dan sebagai data pendukung yang bersifat akurat. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti yaitu :

1. Hasil penelitian Andre Rivano (2021) dalam Artikel “Kerja sama Indonesia - UNAIDS (*United Nations Programme On HIV And AIDS*) Dalam Penanganan HIV/AIDS Di Provinsi Riau”. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan penanggulangan HIV-AIDS oleh UNAIDS di provinsi Riau melalui program *Harm Reduction* yang dilakukan dengan 3 (tiga) program aksi (*action program*) yakni kondomisasi, substitusi metadon, dan distribusi Isoniazid. Peran UNAIDS ini juga sejalan dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Pasal 11 ayat (1) yaitu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan Penyakit Menular. Walaupun dapat dikatakan sejalan dengan pemerintah Indonesia, peran UNAIDS masih mengalami beberapa rintangan seperti tidak sesuai dengan budaya dan agama serta luasnya wilayah Indonesia.²⁴ Penelitian ini dirujuk untuk

²⁴ Andre Rivano, Kerja sama Indonesia - UNAIDS (*United Nations Programme On HIV And AIDS*) Dalam Penanganan HIV/AIDS Di Provinsi Riau, Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau Vol. No.1 Tahun 2021

mengkaji lebih lanjut tentang program dan kondisi penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia melalui peran dan fungsi organisasi UNAIDS. Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti mengkaji implementasi *Getting to Zero* di Indonesia dan tidak fokus terhadap 1 (satu) daerah serta penelitian ini menambah latar situasi pandemi COVID-19.

2. Hasil Penelitian Nurul Anisa Asri dan dkk (2021) dalam Artikel “Peranan *United Nations Joint Program On HIV/AIDS* (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe”. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan peran UNAIDS di Zimbabwe dalam menanggulangi HIV-AIDS di negaranya, adapun UNAIDS memberikan 3 program aksi untuk menekan tingkat HIV-AIDS di Zimbabwe melalui program ABC, *Harm Reduction* dan PMTC. Adapun UNAIDS bekerja sama dengan lembaga lain seperti UNICEF dalam memberikan edukasi mengenai HIV-AIDS dan kesehatan seksual serta lembaga *Global Fund* untuk pendanaan distribusi obat ARV, tes dan konseling, serta penyediaan PrEP sebagai upaya pencegahan. Melalui beberapa program tersebut, UNAIDS berhasil menurunkan secara umum yaitu jumlah penderita HIV sekitar 800 ribu orang di Zimbabwe.²⁵ Penelitian ini dirujuk untuk membahas faktor-faktor dan pengaruh tingkat penularan dari negara penerima terhadap peran UNAIDS. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah mencari tahu faktor dan pengaruh tingkat penularan HIV-AIDS di suatu Indonesia

²⁵ Nurul Anisa Asri dkk. Peranan *United Nations Joint Program On HIV/AIDS* (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe, Hasanuddin *Journal of International Affairs* Vol. 1 No.1 Tahun 2021

terhadap peran UNAIDS. Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti akan membahas peran UNAIDS di Indonesia dan melihat beberapa program aksi yang selaras dan sesuai dengan pemerintah Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19 selama periode 2020-2021, menjelaskan kerja sama UNAIDS dengan lembaga lain, dan memberikan hasil dampak dari program tersebut terhadap tingkat penularan di Indonesia.

3. Hasil penelitian Febby Regina Rista Manopo dalam Skripsi “Upaya *United Nations Programme On AIDS (UNAIDS)* Dalam Mengakhiri Epidemii HIV/AIDS Di Indonesia Melalui *Fast Track Strategy* Tahun 2015-2018”. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan peran UNAIDS melalui program *Fast Track Strategy* di Indonesia dalam periode 2015-2018. Adapun beberapa *action programs* yang dilakukan sebagai upaya *fast track strategy* diantaranya melalui LKB (Layanan Komprehensif HIV dan IMS yang Berkesinambungan). Adapun beberapa kendala seperti tingginya stigma masyarakat, kurangnya distribusi ARV, dan tabunya informasi mengenai HIV-AIDS dan masalah kesehatan seksual menjadi penghambat program ini, sehingga hasil dari program ini masih dikatakan dalam status in efektivitas.²⁶ Penelitian ini dirujuk untuk menganalisis program aksi UNAIDS di Indonesia melalui strategi yang dikeluarkan dalam pencegahan penularan HIV-AIDS. Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis kembali program-program aksi penanggulangan HIV-AIDS oleh UNAIDS

²⁶ Febby Regina Rista Manopo, Skripsi: “Upaya *United Nations Programme On HIV/AIDS (UNAIDS)* Dalam Mengakhiri Epidemii HIV/AIDS Di Indonesia Melalui *Fast Track Strategy* Tahun 2015-2018” (Bandung, UNIKOM, 2019)

di Indonesia yang cocok dengan situasi pandemi. Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti akan membahas strategi *Getting to zero* beserta implementasinya melalui *action program* pada periode 2020-2021, adapun memberikan informasi dalam mengkonfirmasi efektivitas strategi tersebut di masa pandemi COVID-19.

2.2 Teori dan Konsep

Di dalam subbab ini, peneliti menguraikan konsep dan teori yang digunakan untuk mengkaji topik yang dibahas, peneliti menggunakan 2 (dua) yakni konsep organisasi internasional dan kerja sama internasional dan 1 (satu) teori yakni *Non-Traditional Security* yang dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Organisasi Internasional

Secara harfiah, *Clive Archer* mendefinisikan organisasi internasional dari 2 (dua) kata dasar yakni kata organisasi yang diartikan sebagai perkumpulan suatu kelompok yang terstruktur dan terorganisir dan kata internasional yang diartikan sebagai hubungan yang meluas melewati batas negara atau berhubungan dengan negara-negara di seluruh dunia.²⁷ Secara umum *Clive Acher* menjelaskan definisi organisasi internasional secara luas yaitu suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

²⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Organisasi Internasional sendiri merupakan salah satu bentuk dari paradigma *liberalisme* di dalam hubungan internasional. Paradigma *Liberalisme* memberikan pandangan dalam menciptakan institusi di dalam sistem global melalui *liberalisme institusionalis*. Melalui konsep ini kaum *liberalisme* berpandangan bahwa melalui kerja sama yang diikat melalui kelembagaan dapat menyelesaikan permasalahan di dunia internasional. Organisasi Internasional dalam *liberalisme* memberikan peran penting seperti mengurangi biaya transaksi, sarana mendapatkan informasi, ide, serta norma, melegitimasi sebuah ide dan diimplementasikan secara luas serta dapat meningkatkan kapasitas serta kekuatan sebuah negara.²⁸

Adapun Menurut *Clive Archer*, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi suatu negara untuk dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan negaranya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk hubungan *institusionalisme* antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu menjadi wadah diskusi dan juga bernegosiasi.

2. Norma

Organisasi internasional sebagai aktor, ruang dan instrumen yang memberikan kontribusi yang berarti, bagi kegiatan-kegiatan normatif terhadap sistem politik

²⁸ Robert O. Keohane, Lisa L. Martin. The Promise of Institutional Theory, *International Security* Vol. 20, No. 1. 1995

internasional yakni dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional mempunyai fungsi penting untuk mengajak atau mengundang partisipan ke dalam politik global.

4. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk memberikan nilai kepada semua anggota sistem. Proses sosialisasi di tingkat internasional berlangsung di tingkat nasional, dan secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok di banyak negara, termasuk negara-negara yang bertindak dalam lingkungan global atau perwakilan mereka dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi internasional membantu merangkul dan menambah nilai kerja sama.

5. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak diatur oleh pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembentukan keputusan internasional diciptakan berdasarkan pada praktik masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasiona

6. Pelaksanaan peraturan

Penegakan keputusan organisasi internasional hampir pasti dilakukan oleh kedaulatan nasional. Dalam praktiknya, fungsi organisasi internasional yang menerapkan aturan sangat jarang dan lebih terbatas pada pemantauan implementasinya, karena aplikasi sebenarnya ada di tangan negara-negara anggota.

7. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi Ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan.²⁹

Organisasi internasional terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni:

1. Organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organization/IGO*) yang didefinisikan sebagai institusi yang setiap anggotanya adalah merupakan delegasi resmi pemerintah negara-negara di seluruh dunia, contoh: UN (*United Nations*) dan WTO (*World Trade Center*)

2. Organisasi internasional non pemerintah (*International Non-Governmental Organization*) didefinisikan sebagai institusi yang setiap anggotanya adalah pihak eksternal atau swasta sehingga bersifat independen di dalam hubungan

²⁹ Clive Archer, *International Organizations: 4th Edition* (Manchester, Routledge, 2014)

internasional, contoh: ICRC (*International Committee of Red Cross*) dan WWF (*World Wide Fund for Nature*).³⁰

Theodore Coulombis dan James Wolfe menjelaskan tujuan-tujuan terbentuknya organisasi internasional, diantara-Nya:

1. Sebagai pengatur hubungan antar aktor internasional di dalam hubungan internasional terkait penyelesaian sengketa dan isu-isu di dalam sistem global
2. Sebagai cara meminimalisir atau mengontrol konflik-konflik di dalam sistem global
3. Sebagai sarana mempromosikan kerja sama dan kegiatan pembangunan antar negara untuk kepentingan sosial dan ekonomi serta bantuan kemanusiaan
4. Sebagai pertahanan kolektif dalam menghadapi ancaman eksternal.³¹

Adapun menurut A. Le Roy Bennet, fungsi-fungsi keberadaan organisasi internasional di dalam sistem global, yakni:

1. *to provide the means of cooperation among states in areas which cooperation provides advantages for all or a large number of nations*

³⁰ Anak Agung dan Yanyan Mochamad, *Op.cit*

³¹ Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, *Introduction International Relations : Power And Justice*, (New Delhi: Prentice-Hall of India,1981)

2. *to provide multiple channels of communication among governments so that areas of accomodation may be explored and easy acces will be available when problem arise.*³²

Konsep organisasi internasional dirujuk sebagai instrumen dalam menganalisis organisasi UNAIDS yaitu organisasi Internasional yang berfokus dalam penanggulangan dan penyelesaian HIV-AIDS di dalam sistem global. Dalam penelitian ini, konsep organisasi internasional di implementasikan melalui penjelasan lebih lanjut terkait eksistensi UNAIDS melalui peran dan fungsinya selaku organisasi internasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

2.2.2 Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh para aktor dalam hubungan internasional untuk berinteraksi dan mencapai tujuan. Kerja sama internasional berdasarkan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bersifat meluas ke berbagai bidang seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik, sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan. Robert Keohane melihat bahwa kerja sama internasional dalam lingkup hubungan internasional terjadi ketika aktor-aktor di dalamnya (*state dan non state*) menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain dan diantisipasi melalui koordinasi kebijakan bersama.³³

³² Le Roy A. Bennet, *International Organization: Principles and Issue* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997)

³³ Anak Agung dan Yanyan Mochamad, *Lo.cit*

Kerja sama Internasional yang melibatkan negara dengan non-negara dalam hubungan internasional tercipta dari pandangan saling membutuhkan satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan dan kepentingan yang sama. Oleh karenanya keberadaan kerja sama internasional menjadi instrumen dalam mengurangi biaya dan menyediakan informasi guna mencapai tujuan tersebut. Kerja sama Internasional dapat terwujud karena hal-hal berikut:

- 
- Pandangan terkait dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
 - pandangan atau harapan bahwa kebijakan yang diputuskan melalui kerja sama internasional dapat membantu suatu negara dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilai lainnya.
 - persetujuan terhadap suatu masalah di dalam hubungan internasional sehingga dapat memanfaatkan persamaan dan benturan kepentingan antar aktor di dalamnya.
 - aturan resmi atau tidak resmi mengenai kegiatan transaksi di masa depan untuk melaksanakan dan memenuhi tujuan dari kerja sama tersebut.³⁴

Konsep Kerja sama Internasional dirujuk untuk menganalisis peran dan fungsi UNAIDS yang melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan beberapa aktor internasional dalam penanggulangan epidemi HIV-AIDS yang semakin kompleks. Dalam penelitian ini, konsep Kerja sama internasional di implementasikan melalui penjelasan dan analisis lebih lanjut beberapa kerja sama terhadap beberapa

³⁴ Umar Suryadi Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional (Jakarta: Kencana, 2017)

program-program aksi tertentu yang memerlukan kerja sama dengan aktor-aktor internasional dalam mengelola dan membantu penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia khususnya pada masa Pandemi COVID-19.

2.2.3 Human Security Theory

Pasca perang dingin di tahun 1990an, terjadi pergeseran dalam teori keamanan internasional atau *International Security Theory*. Teori keamanan dikenal pada awalnya fokus terhadap keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer dari negara lain, namun perubahan aspek dalam hubungan internasional kian meluas dan beberapa ahli sepakat bahwa pendekatan tradisional tersebut perlu direvisi. Buzan, Weaver, dan Wilde sebagai ahli memperkenalkan pendekatan keamanan terbaru yang dapat meluas ke segala aspek hubungan internasional kontemporer dengan sebutan *Non-Traditional Security* (NTS).³⁵

Non-Traditional Security memberikan fokus baru berupa pembahasan keamanan terhadap masyarakat global, baik kelompok maupun individu. Pendekatan NTS membahas beberapa isu-isu global di luar militer seperti *human security, society security, environmental security, dan economics security*. Ahli dari mazhab *The Copenhagen School* memfokuskan pendekatan ini untuk membahas dan memperluas obyek rujukan isu keamanan sehingga menyangkut juga aspek keamanan manusia.³⁶ Keamanan Manusia atau *Human Security* di dalam NTS

³⁵ Agus Trihartono dan dkk, *Keamanan dan Sekuritas Dalam Hubungan Internasional* (Depok: Melvana Media, 2020)

³⁶ Yanyan Mochamad Yani dan dkk, *Pengantar Studi Keamanan* (Malang: Intrans Publishing 2017)

berfokus kepada 7 (tujuh) aspek sebagai bentuk keamanan yaitu: Pangan, kesehatan, politik, individu, dan kemasyarakatan.

Lembaga UNDP (*United Nations of Development Programme*) memberikan pandangannya mengenai *Human Security* melalui *report* tahun 1994, yaitu: “*safety from such chronic threats as hunger, disease and repression and protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life.*”³⁷

keamanan manusia yang berfokus terhadap kesehatan dikenal dengan sebutan *Health security* atau keamanan kesehatan yang didefinisikan sebagai keamanan untuk menjamin perlindungan bagi manusia dari berbagai penyakit dan pola hidup yang tidak sehat secara keseluruhan baik fisik, mental, dan kehidupan sosial.³⁸

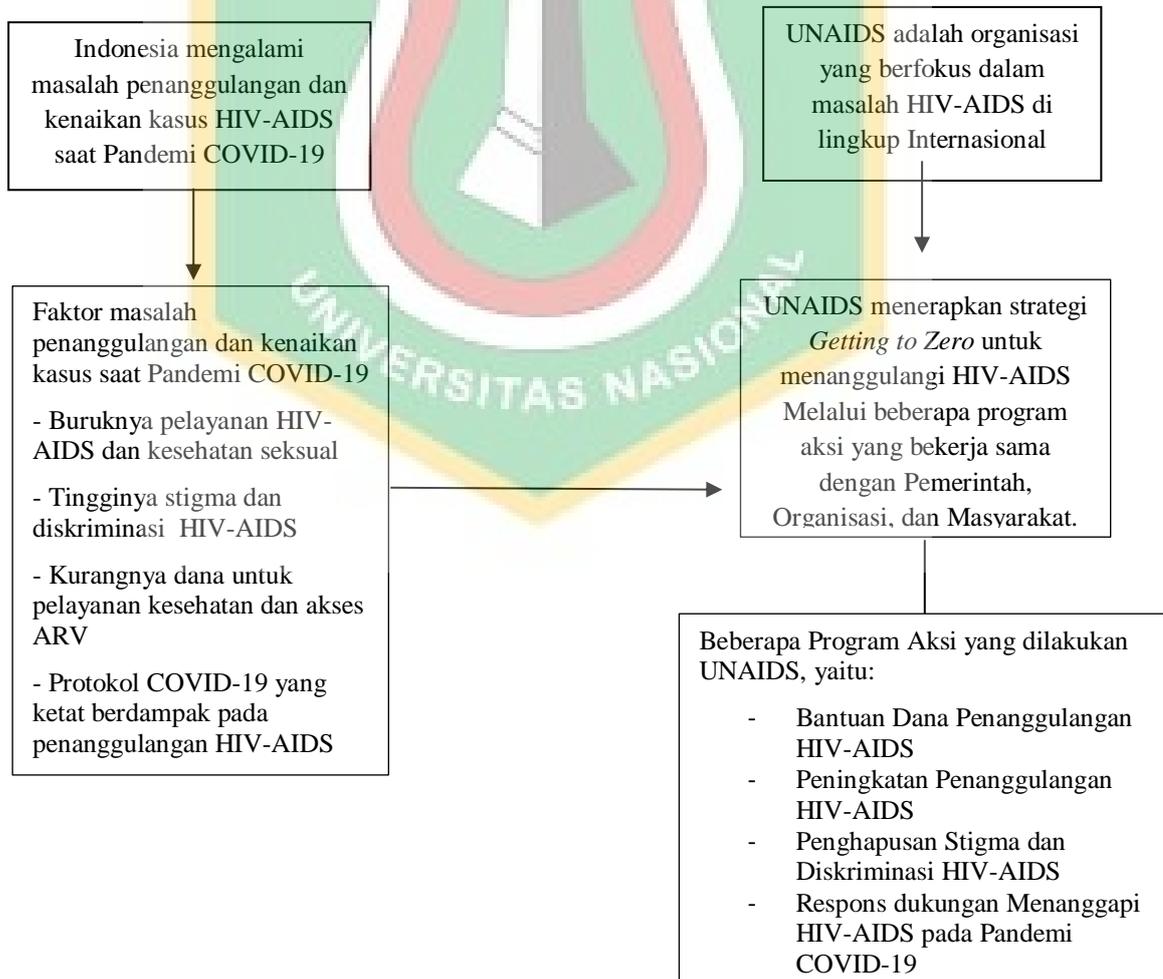
Health security dalam menjaga keamanan manusia berfokus terhadap 2 (dua) pilar dalam penerapannya yakni *empowerment* dan *protection*. *Empowerment* diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas terhadap tanggung jawab kesehatan pribadinya, dan *Protection* yang berfokus tiga pilar preventif di dalam masyarakat yakni: mencegah, memeriksa, dan mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap kesehatan. *Health Security* merupakan salah satu teori yang dalam penerapannya memerlukan kerja sama yang kuat dalam memerangi isu-isu kesehatan di dalam sistem global agar terciptanya keamanan kesehatan global yang baik.

³⁷ United Nations (UN), *United Nations Development Report* (New York: United Nations Development Programme, 1994)

³⁸ Yanyan Mochamad Yani, Op.cit

NTS dirujuk sebagai instrumen dalam menganalisis lebih lanjut mengenai epidemi HIV-AIDS di dalam sistem global sebagai ancaman keamanan manusia dan peran UNAIDS selaku organisasi yang berfokus dalam mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS sebagai ancaman kemanusiaan di dalam sistem internasional. Dalam penelitian ini, *Human Security Theory* di implementasikan melalui penjelasan dan analisis lebih lanjut tentang kondisi HIV-AIDS secara global dan nasional (Indonesia) yang mengancam keamanan manusia serta peran UNAIDS dalam mencegah ancaman epidemi HIV-AIDS lebih lanjut di Indonesia pada masa Pandemi COVID-19.

2.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini dijelaskan sebagai gambaran besar atau alur sistematika topik yang akan diteliti oleh peneliti, adapun peneliti menggunakan konsep dan teori yang sesuai dengan topik tersebut agar dapat dikaitkan ke dalam beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Peneliti mengambil topik permasalahan penanggulangan dan kenaikan kasus HIV-AIDS di Indonesia saat pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: buruknya pelayanan HIV-AIDS dan kesehatan seksual, tingginya stigma dan tabunya HIV-AIDS, kurangnya dana pelayanan kesehatan dan akses ARV, dan Protokol COVID-19 berdampak pada penanggulangan HIV-AIDS.

Dengan adanya masalah tersebut, peneliti menelaah peran UNAIDS sebagai sebuah organisasi internasional yang berdedikasi terhadap permasalahan HIV-AIDS untuk membantu Indonesia mengatasi permasalahan tersebut. UNAIDS melakukan perannya melalui *Getting to Zero Strategy* sebagai upaya dalam menanggulangi masalah dan kenaikan kasus HIV-AIDS di seluruh dunia. peneliti melihat hal tersebut merupakan bentuk peran UNAIDS dalam upaya menjaga keamanan manusia dari masalah keamanan kesehatan di dalam sistem global sampai tahun 2030.

Dalam menggunakan strategi tersebut, UNAIDS mengeluarkan beberapa program aksi sebagai bentuk perannya untuk mengatasi berbagai masalah HIV-AIDS di beberapa negara termasuk Indonesia. Dalam menjalankan program-program aksi tersebut, peneliti melihat UNAIDS melakukan kerja sama internasional dengan beberapa organisasi lain dan negara. Adapun UNAIDS juga

bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, LSM, Komunitas, dan masyarakat dalam mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah HIV-AIDS di tengah pandemi COVID-19. Peran UNAIDS di Indonesia juga merupakan upaya dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Berikut gambaran bangan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti sebagai gambaran besar keseluruhan penelitian.

